

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam satu dekade terakhir, perekonomian global menghadapi dinamika yang fluktuatif sehingga menuntut penguatan ketahanan ekonomi dalam pembangunan modern. Krisis harga komoditas periode 2014–2016 menyebabkan harga minyak mentah dunia turun dari sekitar USD 104 per barel pada 2014 menjadi sekitar USD 43 per barel pada 2016, yang berdampak pada negara pengekspor komoditas termasuk Indonesia (World Bank, 2016). Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dari 5,56 persen pada 2013 menjadi 5,02 persen pada 2014 dan kembali turun menjadi 4,88 persen pada 2015 (Badan Pusat Statistik, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi nasional masih sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global. Fenomena ini menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi guna memperkuat daya tahan terhadap guncangan eksternal (World Bank, 2016).

Perlambatan ekonomi global kembali terjadi pada tahun 2019 ketika pertumbuhan dunia turun dari 3,6 persen pada 2018 menjadi 2,8 persen pada 2019 akibat ketegangan perdagangan internasional (International Monetary Fund, 2021). Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga melambat dari 5,17 persen pada 2018 menjadi 5,02 persen pada 2019 menurut (Badan Pusat Statistik, 2021). Guncangan terbesar terjadi pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi global berkontraksi sebesar -3,1 persen (International Monetary Fund, 2021). Pada tahun yang sama, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen yang merupakan kontraksi pertama

sejak krisis 1998 (Badan Pusat Statistik, 2021). Kontraksi ini mencerminkan tekanan signifikan pada sektor konsumsi rumah tangga, investasi, dan perdagangan internasional.

Memasuki fase pemulihan, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan dari 3,69 persen pada 2021 menjadi 5,31 persen pada 2022 dan relatif stabil sebesar 5,05 persen pada 2023 menurut (Badan Pusat Statistik, 2024). Pemulihan ini didukung oleh meningkatnya konsumsi domestik, belanja pemerintah, serta membaiknya kinerja ekspor komoditas. Secara global, pertumbuhan ekonomi dunia juga meningkat dari -3,1 persen pada 2020 menjadi 6,3 persen pada 2021 sebelum kembali melambat ke 3,5 persen pada 2022 (International Monetary Fund, 2021). Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa risiko ketidakpastian global masih tetap tinggi meskipun fase krisis telah terlewati. Oleh karena itu, konsep resiliensi ekonomi menjadi semakin relevan sebagai indikator kemampuan suatu negara dalam alam menyerap, beradaptasi, dan pulih dari berbagai guncangan ekonomi (IMF, 2023).

Resiliensi ekonomi daerah merupakan konsep yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi, menyerap, dan merespons berbagai guncangan ekonomi secara efektif. Secara konseptual, resiliensi tidak hanya berarti bertahan (*resistance*), tetapi juga mencakup kemampuan beradaptasi (*adaptation*) serta pulih kembali (*recovery*) menuju kondisi pertumbuhan yang stabil setelah terjadi krisis (OECD, 2018). Dalam pembangunan daerah, resiliensi menjadi indikator penting karena struktur ekonomi antarwilayah memiliki tingkat kerentanan yang berbeda terhadap tekanan eksternal maupun internal. Daerah dengan struktur ekonomi yang terdiversifikasi dan kapasitas fiskal yang memadai cenderung memiliki

kemampuan penyesuaian yang lebih baik ketika terjadi kontraksi ekonomi. Oleh karena itu, resiliensi ekonomi daerah dipandang sebagai fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Secara operasional, resiliensi ekonomi daerah dapat diukur melalui beberapa indikator makro yang mencerminkan stabilitas dan kemampuan pemulihan ekonomi. Stabilitas pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama, khususnya dalam melihat seberapa cepat suatu daerah kembali ke tren pertumbuhan setelah mengalami kontraksi. Selain itu, tingkat pengangguran dan kemiskinan juga digunakan untuk menilai dampak krisis terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Indikator lain seperti inflasi turut menjadi ukuran penting karena mencerminkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi. Kombinasi indikator tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai ketahanan struktur ekonomi suatu daerah dalam menghadapi tekanan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi ekonomi yaitu diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah karena mampu mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu. Dalam perspektif teori portfolio ekonomi regional, struktur ekonomi dianalogikan seperti portofolio investasi, di mana penyebaran aktivitas pada berbagai sektor dapat menurunkan risiko akibat guncangan pada satu sektor tertentu (Remy, 2025). Daerah dengan komposisi sektor yang lebih beragam cenderung memiliki stabilitas pertumbuhan yang lebih baik karena sumber pendapatan tidak terpusat pada satu komoditas atau aktivitas ekonomi saja. Sebaliknya, daerah dengan struktur ekonomi yang terkonsentrasi menghadapi risiko volatilitas yang lebih tinggi ketika terjadi krisis

sektoral. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan resiliensi ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Secara empiris, daerah yang berbasis manufaktur dan jasa relatif lebih stabil dibandingkan daerah yang sangat bergantung pada sektor primer. Sektor manufaktur dan jasa memiliki rantai nilai yang lebih panjang serta pasar yang lebih luas sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas pendapatan daerah (OECD, 2018). Namun demikian, ketergantungan yang terlalu besar pada satu subsektor jasa juga dapat menimbulkan kerentanan, sebagaimana terlihat pada Provinsi Bali yang perekonomiannya didominasi sektor pariwisata. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, ekonomi Bali berkontraksi sekitar -9,31 persen akibat anjloknya kunjungan wisatawan (Badan Pusat Statistik, 2021).

Aktivitas ekonomi di Bali tidak sepenuhnya berhenti karena masih terdapat sektor penunjang seperti pertanian, perdagangan lokal, dan industri pengolahan skala kecil yang tetap berjalan serta menjaga pasokan kebutuhan domestik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontraksi lebih banyak terjadi pada sektor berbasis pariwisata yang berorientasi pada permintaan eksternal, sementara sektor ekonomi lain tetap berfungsi sebagai penyangga aktivitas ekonomi daerah. Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun sektor jasa cenderung lebih stabil dalam kondisi normal, kurangnya diversifikasi lintas sektor tetap dapat meningkatkan risiko ketika terjadi guncangan besar (Fevriera & Tjandra, 2023).

Penelitian oleh He et al. (2022) menunjukkan bahwa diversifikasi industri berkontribusi pada peningkatan resiliensi ekonomi regional. Kawasan dengan struktur industri yang lebih beragam cenderung mampu mempertahankan dan

memulihkan ekonomi mereka setelah mengalami guncangan, karena keberagaman sektor membantu menyebarkan risiko serta menciptakan sumber pertumbuhan alternatif. Sebaliknya, penelitian oleh Amin & Widyawati (2025) menemukan bahwa diversifikasi subsektor industri manufaktur justru memiliki pengaruh negatif terhadap resiliensi ekonomi regional. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi sering dianggap positif, struktur diversifikasi yang tidak sesuai dapat mengurangi ketahanan ekonomi terhadap guncangan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi resiliensi adalah pendapatan asli daerah (PAD). Otonomi daerah yang diberlakukan melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). PAD mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (Badan Pusat Statistik, 2022). Semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan tanpa tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan kemandirian fiskal yang lebih tinggi, daerah dapat merencanakan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan responsif terhadap perubahan ekonomi. PAD menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal dan resiliensi ekonomi daerah.

Perbandingan antara provinsi maju dan tertinggal di KTI memperlihatkan dampak signifikan terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan. Provinsi dengan PAD tinggi mampu membiayai proyek infrastruktur dan layanan publik lebih fleksibel, sedangkan provinsi dengan PAD rendah cenderung menghadapi

keterbatasan dalam alokasi anggaran pembangunan (OECD, 2018). Ketergantungan yang tinggi pada Dana Transfer Pusat dapat membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional atau keterlambatan pencairan dana. Oleh karena itu, diversifikasi sumber PAD, termasuk pengembangan pajak daerah dan BUMD, menjadi langkah strategis untuk memperkuat stabilitas fiskal. Penguatan PAD juga berperan dalam meningkatkan resiliensi ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal maupun internal.

Penelitian Amal et al. (2025) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap tekanan fiskal (*fiscal stress*), yang mengindikasikan bahwa daerah dengan PAD lebih tinggi memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk merespons guncangan ekonomi dan mempertahankan penyediaan layanan publik, yang merupakan salah satu aspek resiliensi ekonomi daerah. Sebaliknya, penelitian Kadafuk et al. (2025) yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, di mana PAD yang optimal tidak secara langsung mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang dijadikan salah satu indikator resiliensi ekonomi lokal.

Faktor yang diduga dapat mempengaruhi resiliensi ekonomi yaitu belanja sosial. Belanja sosial merupakan salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Komponen ini meliputi belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Melalui belanja pendidikan, pemerintah daerah dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan sehingga meningkatkan kualitas

sumber daya manusia. Belanja kesehatan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, menurunkan angka kesakitan, dan meningkatkan produktivitas. Sementara itu, belanja perlindungan sosial memberikan jaring pengaman bagi kelompok rentan sehingga dapat menahan dampak negatif guncangan ekonomi lokal maupun nasional.

Investasi dalam belanja sosial memiliki hubungan erat dengan peningkatan modal manusia (*human capital*), yang menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing dan resiliensi ekonomi daerah. Modal manusia yang berkualitas mendorong produktivitas tenaga kerja dan inovasi lokal, sehingga ekonomi daerah dapat lebih adaptif terhadap perubahan eksternal (Becker, 1993). Misalnya, peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi dapat mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi kebutuhan pasar kerja modern. Demikian pula, belanja kesehatan yang memadai akan menurunkan risiko produktivitas menurun akibat penyakit, sehingga meminimalkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, alokasi belanja sosial yang optimal menjadi strategi penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian Runi et al. (2024) yang menemukan bahwa program bantuan sosial berupa transfer tunai meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat miskin selama pandemi COVID-19, yang tercermin dari peningkatan konsumsi, permintaan barang dan jasa, serta pemulihan aktivitas ekonomi di tingkat lokal, sehingga mendukung kemampuan ekonomi komunitas untuk pulih dari guncangan eksternal. Namun, temuan Sari & Riyanto (2024) pada program bantuan sosial COVID-19 di DKI Jakarta menemukan bahwa meskipun belanja bantuan sosial meningkat signifikan, angka kemiskinan tetap meningkat,

sehingga intervensi sosial tersebut belum berhasil mempertahankan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh dalam menghadapi tekanan ekonomi pandemi.

Resiliensi ekonomi daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan laju pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan stabilitas serta pulih dari berbagai guncangan ekonomi. Provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menghadapi tantangan serius dalam membangun ketahanan ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari dinamika pertumbuhan ekonomi yang cenderung tidak stabil serta menunjukkan disparitas yang cukup tinggi antarprovinsi.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia Tahun 2023-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026).

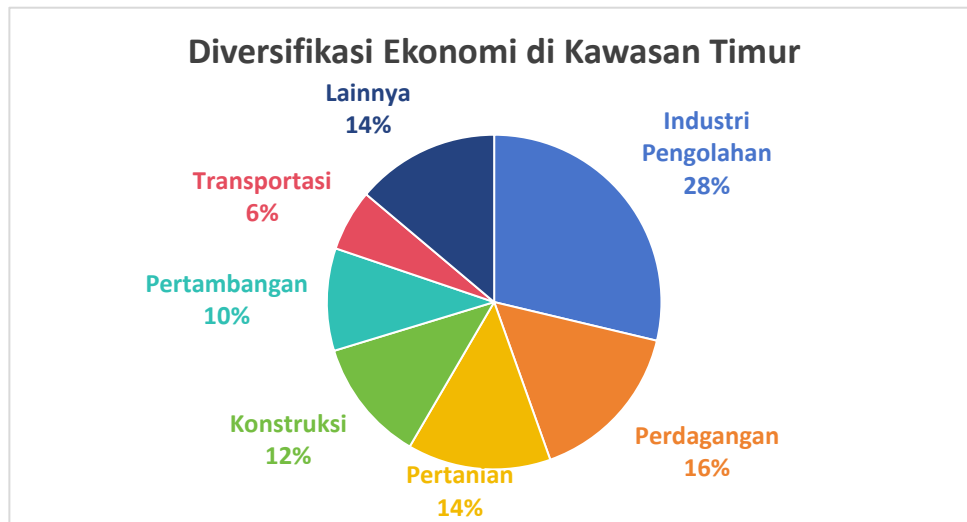
Berdasarkan Gambar diatas, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator resiliensi ekonomi daerah di KTI selama periode 2023–2025 mengalami fluktuasi yang signifikan. Beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah dan tidak stabil, seperti Nusa Tenggara Barat

yang hanya tumbuh sebesar 0,22% pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 3,70% pada 2024, namun kembali melambat menjadi 1,69% pada tahun 2025. Kondisi serupa juga terjadi di Papua yang cenderung stagnan dengan pertumbuhan hanya berkisar antara 2,70% hingga 2,85% dalam tiga tahun terakhir.

Terdapat pula daerah yang menunjukkan pertumbuhan sangat tinggi namun tidak stabil, seperti Maluku Utara yang mengalami lonjakan signifikan dari 19,87% pada tahun 2023 menjadi 32,40% pada tahun 2025, serta Papua Barat yang melonjak tajam pada 2024 sebesar 18,89% namun kembali menurun pada tahun berikutnya. Sementara itu, Papua Tengah mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam pada tahun 2025 sebesar -22,82% yang diduga dipengaruhi oleh penurunan aktivitas sektor utama seperti pertambangan dan konstruksi, serta fluktuasi investasi di wilayah tersebut yang berdampak langsung terhadap output ekonomi daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa resiliensi ekonomi di Kawasan Timur Indonesia masih rentan terhadap guncangan dan belum menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menopang stabilitas ekonomi jangka panjang.

Diversifikasi ekonomi dalam penelitian ini diukur melalui distribusi kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, yang menunjukkan tingkat penyebaran aktivitas ekonomi antar sektor.

**Gambar 1.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kawasan Timur Indonesia
Tahun 2025**



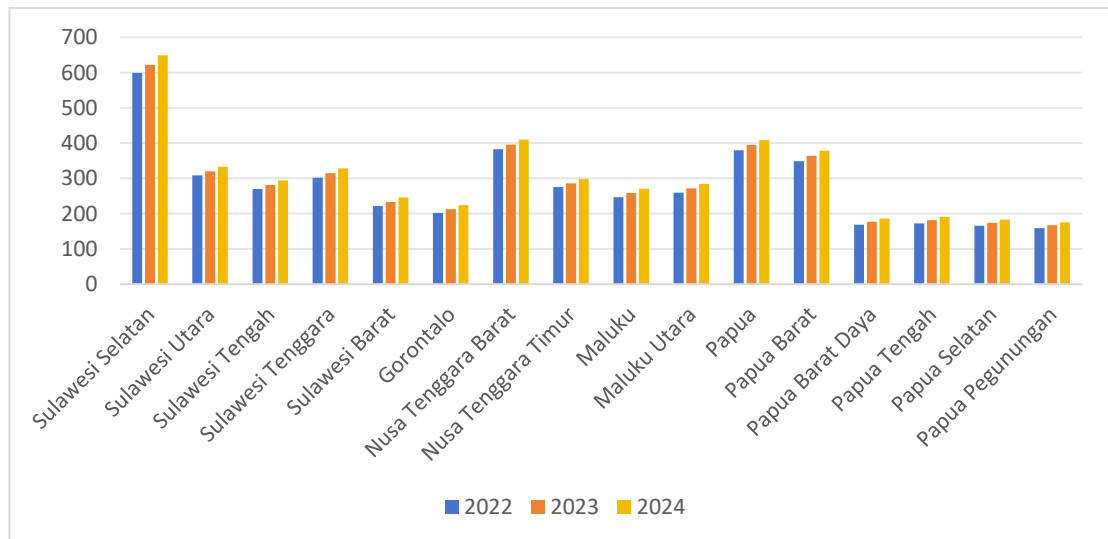
Sumber: Badan Pusat Statistik (2026).

Struktur PDRB di KTI masih didominasi oleh beberapa sektor utama, seperti industri pengolahan sebesar 29%, perdagangan sebesar 16%, dan pertanian sebesar 14%, sementara sektor lainnya memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil. Dominasi sektor-sektor tertentu ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah belum tersebar secara merata ke berbagai sektor produktif. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor tertentu menyebabkan daerah menjadi lebih rentan terhadap perubahan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas atau penurunan permintaan pasar. Dengan demikian, rendahnya diversifikasi ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya resiliensi ekonomi di kawasan tersebut.

Belanja sosial dalam penelitian ini diukur melalui alokasi pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja sosial sebagai instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat juga belum menunjukkan peran yang optimal dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Gambar 1.3 Belanja Sosial di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2023-2024

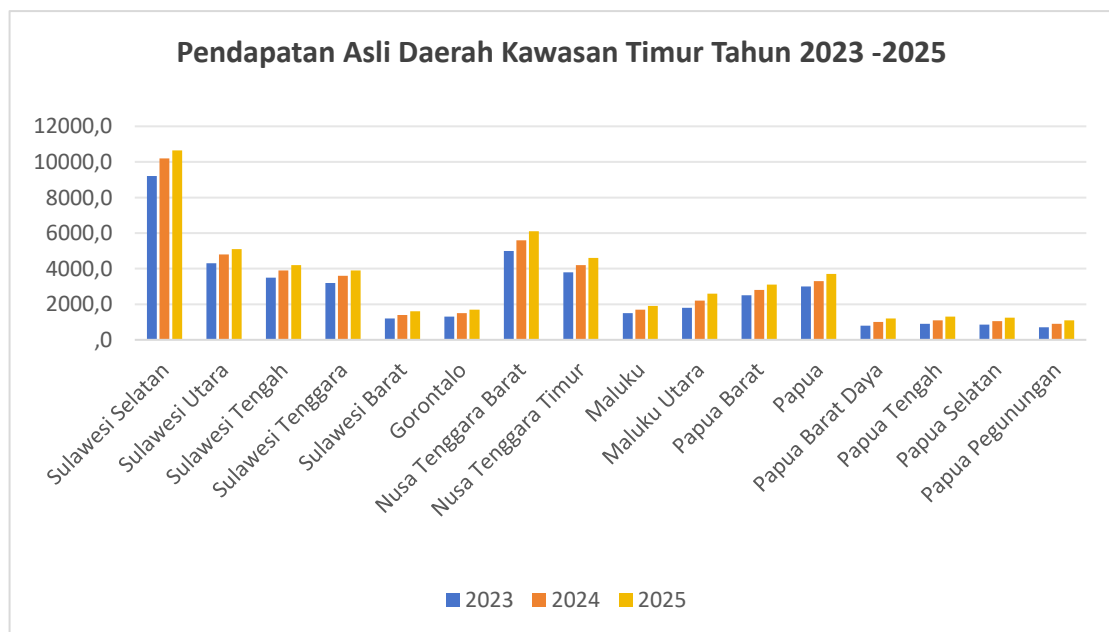


Sumber: Badan Pusat Statistik (2026).

Berdasarkan Gambar 1.3, terlihat bahwa belanja sosial di seluruh provinsi Kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2022–2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas intervensi sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi dengan nilai belanja sosial tertinggi adalah Sulawesi Selatan, yang meningkat dari Rp598,66 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp648,73 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, provinsi dengan nilai relatif rendah seperti Papua Pegunungan dan Papua Selatan juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun dalam jumlah yang lebih terbatas. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan kapasitas fiskal antar daerah dalam mengalokasikan anggaran sosial.

Namun demikian, peningkatan belanja sosial tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan resiliensi ekonomi yang stabil di seluruh wilayah. Beberapa daerah masih mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi meskipun alokasi belanja sosial terus meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas belanja sosial sebagai instrumen kebijakan dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah masih belum optimal. Selain itu, adanya kesenjangan alokasi antarprovinsi juga menunjukkan bahwa pemerataan belanja sosial masih menjadi tantangan dalam mendukung resiliensi ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

**Gambar 1.4 Pendapatan Asli Daerah Kawasan Timur Indonesia
Tahun 2023 - 2025**



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026).

Kemampuan fiskal daerah yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan adanya kesenjangan antarprovinsi di KTI. Data menunjukkan bahwa provinsi seperti Sulawesi Selatan memiliki PAD yang relatif tinggi, yaitu sebesar Rp9.200 miliar pada tahun 2023 dan meningkat menjadi

Rp10.650 miliar pada tahun 2025. Sebaliknya, provinsi-provinsi baru seperti Papua Pegunungan hanya memiliki PAD sebesar Rp700 miliar pada tahun 2023 dan meningkat menjadi Rp1.100 miliar pada tahun 2025. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas fiskal yang cukup besar antar daerah. Rendahnya PAD di sebagian wilayah mengindikasikan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan merespons guncangan ekonomi secara mandiri.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi ekonomi daerah, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya inkonsistensi. Beberapa studi menemukan bahwa diversifikasi ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap ketahanan ekonomi, namun penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan bahkan negatif. Hal serupa juga terjadi pada variabel belanja sosial, di mana peningkatan anggaran sosial belum tentu secara langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun memperkuat ketahanan ekonomi. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap resiliensi ekonomi masih belum memiliki kesimpulan yang konsisten dan dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing daerah.

Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung mengkaji variabel-variabel tersebut secara terpisah dan lebih banyak berfokus pada wilayah Indonesia bagian barat atau dalam skala nasional. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis pengaruh diversifikasi ekonomi, PAD, dan belanja sosial secara simultan terhadap resiliensi ekonomi di Kawasan Timur Indonesia masih terbatas. Padahal, kawasan ini memiliki karakteristik ekonomi yang

berbeda, seperti ketergantungan pada sektor tertentu dan kapasitas fiskal yang relatif rendah, sehingga berpotensi menghasilkan temuan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang ada, dapat disimpulkan bahwa permasalahan resiliensi ekonomi di Kawasan Timur Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur ekonomi daerah (diversifikasi ekonomi), kapasitas fiskal daerah (PAD), serta kebijakan pengeluaran pemerintah (belanja sosial). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh diversifikasi ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan belanja sosial terhadap resiliensi ekonomi daerah di Kawasan Timur Indonesia, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh diversifikasi ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja sosial secara parsial terhadap resiliensi ekonomi daerah di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2014–2024?
2. Bagaimana pengaruh diversifikasi ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja sosial secara simultan terhadap resiliensi ekonomi daerah di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2014–2024?
3. Variabel manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap terhadap resiliensi ekonomi daerah di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2014–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh diversifikasi ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja sosial secara parsial terhadap resiliensi ekonomi daerah di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2014–2024
2. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh diversifikasi ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja sosial secara simultan terhadap resiliensi ekonomi daerah (Y) di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2014–2024
3. Untuk mengetahui variabel manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap terhadap resiliensi ekonomi daerah di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2014–2024

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori resiliensi ekonomi daerah dengan memperkaya kajian mengenai konsep resiliensi ekonomi dalam konteks pembangunan daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian teoritis mengenai diversifikasi ekonomi, kapasitas fiskal daerah, dan belanja sosial sebagai konsep-konsep yang berkaitan dengan resiliensi ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori dan penelitian selanjutnya mengenai resiliensi ekonomi daerah, khususnya pada wilayah Kawasan Timur Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan ekonomi, pengelolaan PAD, dan alokasi belanja sosial yang lebih efektif, sehingga dapat memperkuat resiliensi ekonomi daerah.

2. Bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sektor-sektor yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait penguatan ekonomi daerah, pengelolaan fiskal, dan strategi pembangunan berbasis resiliensi, serta dapat digunakan untuk membandingkan kondisi di wilayah lain atau memperluas kajian dengan variabel tambahan.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh diversifikasi ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan belanja sosial terhadap resiliensi ekonomi daerah di Kawasan Timur Indonesia.
2. Objek penelitian mencakup seluruh provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia.

3. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2014 hingga 2024.
4. Variabel lain di luar variabel yang diteliti tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.
5. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan.